

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, M. Hatta. (2012). *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Cet.1.Bandung: P.T. Alumni.
- Amirudin, & Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hartono, Sunaryati. (1975). *Peranan Peradilan dalam Rangka Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*. Cet.1.Bandung:Binacipta.
- Ishaq, H. (2016). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Juwanta, Hikmahanto. (2002). *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Cet.1. Jakarta:Lentara Hati
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Buku Panduan E-Court (The Electronic Justice System)*. Jakarta.
- Mahmud, P. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Masruhan. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya:Hilal Pustaka
- Manan, Bagir. (2009). *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta :Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*. Yogyakarta:Liberty.
- Moleong, L. J. (1999). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktek dan Permasalahannya*. Bandung: PT Alumni.

- Pangaribuan, M.P., Luhut. (2009). *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1962). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Sumur Batu.
- Stein, P.A. (1973). *Compendium Van Het Burgerlijk Procesrecht*. Deventer:kluwer.
- Soepomo, R. (1958). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta:Fasco.
- Soeroso, R. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Star Busman, C.W. (1972). *Hoofstukken van Burgerlijke Rechtsvordering*. Haarlem: De Erven F.Bohn N.V.
- Suadi, Amran. (2019). *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta:Kencana.
- Sutriyoso, B. (2010). *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Winardi, & Sirajuddin. (2019). *Politik Hukum*. Malang: Setara Press.
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Het Herziene Indoneisch Reglement (HIR)*

*Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 3, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454)

Peraturan Mahkamah Agung Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894)

Surat Edaran Mahkamah Agung No 6 tahun 1992 tentang pedoman yang mengharuskan setiap perkara diputus dalam waktu paling lama 6 bulan dan bila melampaui batas maka harus melaporkan kepada ketua pengadilan yang menangani perkara tersebut beserta alasannya

Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik

Surat Keputusan No 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan Yang Tentunya Dikelola Oleh Pengadilan Dan Dapat Diminta Oleh Masyarakat Dengan Cara Konvensional

### C. JURNAL

Dewi Anggraeni, R.R. (2020). *Wabah Pandemi Covid-19 Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik*. Jakarta, Jurnal UIN, 4(1) : 7-12, DOI : [10.15408/adalah.v4i1.15264](https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15264)

Retnaningsih, S., Soroinda Nasution, D. L., & Valentina, R. A. (2020). Pelaksanaan E-Court Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri

di Indonesia). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1).  
DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>

Rudy, D. G., & Mayasari, I. D. A. D. (2021). Keabsahaan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Elektronik. Denpasar, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1):164-174,  
DOI : <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31440>

#### **D. LAIN-LAIN:**

Komisi Hukum Nasional dan Universitas Brawijaya, *Akses Publik atas Informasi Hukum*. (2003). Hasil Penelitian KHN bersama PP OTADA Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2003.

Khusaini, S.H., M.H. (2023, 12 April). Wawancara dengan Bapak Khusaini S.H., M.H., Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus.

[pn-surabayakota.go.id](http://pn-surabayakota.go.id) diakses pada 13 Mei 2023 pukul 22:09 WIB.

Sutrisno, S.H., M.H. (2023, 26 September). Wawancara dengan Bapak Sutrisno S.H., M.H., Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus.

Vivi. (2023, 19 Desember). Wawancara dengan Ibu Vivi, Petugas Meja E-Court di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus.

Ivan. (2023, 20 Desember). Wawancara dengan Ibu Ivan, Pegawai Kepaniteraan Perdata di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus.